

Judul : Terdampak bencana, UKT mahasiswa dibebaskan?
Tanggal : Selasa, 16 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Terdampak Bencana

UKT Mahasiswa Dibebaskan?

Menyikapi bencana alam di Sumatera, beberapa kampus menunjukkan dukungan kepada mahasiswa terdampak dengan memberikan keringanan uang kuliah tunggal (UKT) hingga beasiswa. Langkah ini pun mendapat dukungan. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiknas) merumuskan sejumlah rencana aksi pemulihan atas dampak bencana di Sumatera.

Direktur Riset dan Pengembangan Kemendiknas Fauzan Adziman mengatakan, salah satu langkah yang ditempuh adalah pembebasan UKT 1 hingga 2 semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak bencana. "Pemberian pembebasan UKT 1 sampai 2 semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak," kata Fauzan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin

(8/12/2025), dikutip dari Antara. Dia menyampaikan rencana aksi pada tahap pemulihan itu dijadwalkan mulai dijalankan pada Januari 2026 menggunakan anggaran pada tahun tersebut. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati mendukung kebijakan pemberian keringanan UKT. Menurut dia, kebijakan ini adalah wujud nyata kehadiran negara yang memang sudah

dinantikan oleh masyarakat yang sedang tertimpa musibah. "Ini adalah langkah kemanusiaan yang tepat," ujar Mufidayati, Minggu (15/12/2025). Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat menilai sudah sewajarnya jika Pemerintah maupun universitas memberikan keringanan biaya UKT mahasiswa terdampak bencana. Namun, dia meminta agar Pemerintah membentuk tim untuk mendata

kondisi para mahasiswa di lokasi bencana. "Mungkin diperlukan juga satuan tugas untuk mendata mahasiswa, maupun data-data berkas pendidikan," ujar Rakhmat Hidayat kepada Rakyat Merdeka, Senin (15/12/2025). Untuk mengetahui pandangan Kurniasih Mufidayati dan Rakhmat Hidayat mengenai rencana pemberian keringanan biaya UKT bagi mahasiswa, berikut wawancaranya.

KURNIASIH MUFIDAYATI, Wakil Ketua Komisi X DPR

Ini Wujud Nyata Kehadiran Negara



“
Saya meminta
Pemerintah tidak
tebang pilih dalam
memberikan
bantuan
pendidikan.”

Apakah tanggapan Anda dengan rencana kebijakan pemberian keringanan biaya UKT bagi mahasiswa yang terdampak bencana?
Tentu kami menyambut positif langkah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mengeluarkan kebijakan pembebasan dan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa terdampak bencana di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, dan Bandung.

Seberapa besar manfaat dari kebijakan ini?
Tentu kebijakan ini adalah wujud nyata kehadiran negara yang memang dinantikan oleh masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Kami di Fraksi PKS mengapresiasi respons

cepat Pemerintah. Ini adalah langkah kemanusiaan yang tepat.

Apakah ini bisa dengan mudah dilakukan di lokasi bencana?
Nah, catatan penting kami adalah pada implementasinya di lapangan.

Apakah yang menjadi catatan Anda?
Jangan sampai mahasiswa yang rumahnya hancur atau orang tuanya menjadi korban, masih dibebani dengan syarat administrasi yang rumit.

Langkah nyata seperti apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah?
Saya mendesak agar pihak kampus dan Kementerian melakukan aksi "jemput bola" menggunakan data terpadu kebencanaan, sehingga ban-

tuhan bisa langsung dirasakan tanpa birokrasi berbelit.

Lalu bagaimana nasib mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang juga terdampak bencana?
Saya meminta Pemerintah tidak tebang pilih dalam memberikan bantuan pendidikan. Bencana tidak memilih status kampus Negeri atau Swasta. Saudara-saudara kita yang kuliah di PTS juga banyak yang terdampak ekonominya.

Skema untuk yang kampus swasta seperti apa ya?
Fraksi PKS mendorong adanya skema bantuan alternatif atau dana takris untuk mahasiswa PTS di daerah bencana agar tidak ada yang putus kuliah. ■ **NNN**

RAKHMAT HIDAYAT, Ketua Dewan Pakar P2G

Perlu Satgas Untuk Melakukan Pendataan



“
Tanpa diminta
seharusnya negara
menyelamatkan
mahasiswa yang
terancam tidak
lanjut kuliah.”

Bagaimana Anda melihat rencana keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa terdampak bencana Sumatera?

Menurut saya, universitas atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi seharusnya seperti itu ya. Harus memberikan keringanan biaya kuliah apapun skemanya. Karena itu tanggung jawab negara. Kedua, itu merupakan bagian implementasi amanat Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut saya, keringanan biaya kuliah lebih esensial membantu mahasiswa melanjutkan studi. Kalau dihitung akumulasinya secara nasional, efeknya itu sangat signifikan.

Kenapa memangnya?

Karena itu bisa mengurangi angka putus studi atau kuliah. Jadi kebijakan ini dampaknya signifikan. Menurut saya, tanpa diminta seharusnya negara melalui kementerian atau universitas, melindungi dan menyelamatkan mahasiswa yang terancam tidak lanjut kuliah. Jangan sampai ada mahasiswa pun yang terhambat oleh biaya studi kemudian dia putus di tengah jalan. Itu keceklakan sejarah. Sebab, dia punya hak untuk mendapatkan hak pendidikan tinggi. Lalu negara harus melindungi mereka.

Universitas tidak boleh lepas tangan. Jangan sampai satu orang tidak punya biaya studi, kemudian berhenti di tengah jalan, ada yang depresi. Jangan sampai terjadi. Itu sangat memalukan.

Artinya, kebijakan pemberian keringanan biaya UKT harus diikuti oleh semua kampus ya?

Harus. Jadi semata-mata karena kampus lain sudah duluan kemudian tidak. Seharusnya kampus sudah punya inisiatif untuk menyelamatkan mahasiswa. Karena tidak boleh ada satu mahasiswa yang terhambat biaya pendidikannya terus dia putus di tengah jalan. Negara harus menyelamatkan itu.

Dari mana saja sumber biaya pendidikannya?

Bisa mencari sumber dana abadi, mencari peluang dari yang lain. Itu prinsip universitas untuk hadir menyelamatkan. Karena universitas hadir untuk meningkatkan akselerasi pendidikan tinggi. ■ **NNN**